



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AUDY JOINALDY**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **752372**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 45.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000.000
2. Tanah Seluas 321 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 558 m2/800 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/255 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/251 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 800.000.000**

1. MOBIL, BMW X4 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 105.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.440.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	6.600.000.000
Sub Total	Rp.	54.895.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	54.895.000.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.